

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU

Mohd. Sukran Mupid

Program Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Community Participation in the Program Implementation Desa Maju. This study aims to find out the Program Implementation Inhil Desa Maju Jaya in development planning with the socioeconomic conditions. This research is qualitative. The informants are elements of the district and village communities. Data collection techniques in this study using semi-structured interviews and observation. Analysis of the data in this study using interactive model analysis of Miles and Huberman which includes the step of data reduction, data presentation and verification of data or drawing conclusions. From the research it can be concluded that the process of activity at the level of community participation in the implementation of the Program Desa Maju Jaya Inhil not been implemented optimally and still low. Then the public participation in the implementation of Program Desa Maju Jaya Inhil with socioeconomic relationship with the level of participation is still low.

Keywords: community participation, rural development program forward, planning

Abstrak: Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Maju. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya dalam perencanaan pembangunan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah unsur masyarakat perangkat Kecamatan dan Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada proses kegiatan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya belum dilaksanakan secara optimal dan masih rendah. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya dengan hubungan tingkat sosial ekonomi masyarakat dengan tingkat partisipasi masih rendah.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan program desa maju, perencanaan

PENDAHULUAN

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) merupakan Program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Alur kegiatan Program Desa Maju Inhil Jaya meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sistem pengalokasian anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya menggunakan Sistem Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sistem ADD besar plafond dana masing-masing desa bervariasi. Alokasi dana di setiap desa

ditetapkan oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir berdasarkan kriteria desa yang sesuai kapasitas dengan kemampuan SDM desa masing-masing. Untuk itu diharapkan kesadaran masyarakat itu sendiri agar lebih ikut serta dalam proses pelaksanaan program DMIJ di Kecamatan Keritang, tetapi pada kenyataannya masyarakat pada umumnya belum siap untuk ikut berperan serta pada pelaksanaan program tersebut, mereka masih beranggapan bahwa dari setiap kegiatan

yang dilaksanakan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Padahal pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga hasil dari kegiatan pembangunan itu tidak optimal dari kualitas pembangunan yang terlaksana. Dari permasalahan diatas Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian tesis ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya.

Berdasarkan fenomena diatas dapat diuraikan beberapa masalah yang dikemukakan yaitu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa maju Inhil jaya (DMIJ) di Kecamatan Keriting Kabupaten Indragiri Hilir dan bagaimana hubungan tingkat sosiasl ekonomi masyarakat dengan tingkat partisipasi ?.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok orang yang mendiami suatu wilayah atau negara tertentu yang mempunyai kepentingan yang sama, satu ikatan dan saling berhubungan satu sama lain untuk mengambil bagian dan bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tertentu baik secara fisik maupun non fisik. Wicaksono dan Sigiarto (dalam Wijaya, 2001) berpendapat bahwa pelaksanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: 1) Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan; 2) Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tena-

ga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut; dan 3) Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa maju Kecamatan Keriting Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis model interaktif (*interactive of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (*verification*). Informan penelitian adalah unsur masyarakat dengan metode *purposive sampling* dan Camat, perangkat Kemamatan, Kepala Desa. Dalam pelaksanaan program ini teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sekunder, wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kegiatan program DMIJ sangat perlu diawasi oleh pemerintah dan masyarakat, karena akan mudah disalahgunakan dari kepentingan-kepentingan sepihak. Maka perlu dilibatkan semua pihak sebagai *check and balance* agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan.

Proses (langkah dan cara kerja) yang tepat guna dan tepat sasaran dan membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Dari

perinsip ini sesuai pernyataan Bupati Indragiri Hilir pada gambar 1.



Gambar 1. Bupati Inhil, HM Wardan membuka Rakor dan Evaluasi Program DMIJ, Selasa (29/12/2015).

Dua tahun bergulir, program DMIJ (Desa Maju Inhil Jaya) yang merupakan bentukan Bupati Inhil (Indragiri Hilir), HM Wardan telah banyak membantu pembangunan di desa-desa yang ada di Negeri Seribu Parit ini. Seperti pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya, namun demikian, pemimpin Inhil itu tidak ingin cepat berpuas diri. Dirinya tetap mengingatkan agar terus dilakukan evaluasi terhadap program tersebut. Seperti yang disampaikan saat membuka Rakor (Rapat koordinasi) dan evaluasi DMIJ di gedung Puri Cendana Tembilahan, Selasa (29/12/2015), bahwa masih banyak perbaikan yang harus dilakukan dalam program DMIJ.

Dari hasil evaluasi dan pemantauan program DMIJ sejak tahun 2014 hingga 2015, masih banyak terdapat kelemahan dalam melaksanakan program DMIJ. Beberapa hal yang menjadi perhatian dan perlu menjadi bahan evaluasi, yang pertama dikatakan Bupati adalah dimana sebagian desa masih belum melaksanakan sistem pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri 113 tahun 2014. "Masih banyak Kepala Desa yang belum menyerahkan wewenang keuangan desa kepada bendahara desa," tuturnya.

Hal kedua yang perlu dievaluasi, dikatakan Bupati terkait kurangnya keterli-

batan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga untuk yang akan datang perlu melibatkan masyarakat secara lebih baik, terutama memfungsikan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Selain itu, akuntabilitas dan transparansi perlu ditingkatkan melalui manajemen Masjid," tambahnya. Kemudian, dikatakan Bupati masih banyak perangkat desa yang belum menjalankan tupoksinya. "Juga perlu mengevaluasi seluruh pendamping desa dan fasilitator kecamatan dan kabupaten, hal itu untuk meningkatkan kinerjanya dalam pola pendampingan yaitu memfasilitasi desa dalam pelaksanaan seluruh program yang ada di desa," tukas HM Wardan.

Dari pernyataan diatas terbukti bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program DMIJ dikarenakan masih banyak kelemahan dan kekurangan seperti SDM pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa serta kegiatan fisik dan non fisik yang tidak sesuai TUPOKSI program yang tidak melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait secara optimal dan perlu transparansi pelaksana program.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa maju Inhil jaya (DMIJ) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir., analisis yang digunakan adalah: Pertama, fokus perencanaan, berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan perencanaan partisipatif di Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahunan kecamatan berupa daftar prioritas kegiatan kecamatan yang akan disampaikan pada proses yang lebih tinggi.

Pada pelaksanaannya di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, perencanaan partisipatif dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan keluaran perencanaan pembangunan. Masyarakat diharap-

kan terlibat dan memahami seluruh rangkaian dari proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Fokus perencanaan yang berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan mulai dari tingkat RT yang merupakan bagian dari tahap persiapan dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, untuk beberapa desa melakukan kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT sehingga diperoleh profil masalah dan kebutuhan masyarakat, namun untuk sebagian desa lainnya jenis usulan yang diajukan didiskusikan pada saat pelaksanaan musbang dusun, dan bukan digali dari kelompok-kelompok masyarakat.

Perencanaan yang disiapkan belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dilakukan pada tingkat dusun yang artinya hanya perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, namun tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas masalah dan kebutuhan dusun yang akan disampaikan pada proses perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa. Kedua, partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat, serta masyarakat dilibatkan dalam memutuskan kegoatan mana yang dianggap prioritas untuk diajukan ke musrenbang yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan adalah rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh faktor yaitu keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan, adanya sikap pesimis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan karena usulan-usulan mereka tidak terakomodasi dalam proses

yang lebih tinggi dan terbatasnya jumlah aparat dan kader pembangunan yang bertugas mengkomunikasikan informasi mengenai perencanaan pembangunan kepada masyarakat. Ketiga, sinergitas perencanaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Pada pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Keritang, proses pengambilan keputusan yang diselenggarakan di tingkat Desa dan Kecamatan secara formal telah dilakukan dengan baik meskipun ada beberapa tahapan dalam proses perencanaan pembangunan tidak dilaksanakan. Bila dilihat dari sisi peserta, belum mewakili unsur masyarakat di Kecamatan Keritang, terlebih dalam proses perencanaan kecamatan, tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah. Namun bila dilihat dari dokumen sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, sudah tersedia beberapa kelengkapan seperti: daftar prioritas permasalahan/kegiatan desa/kelurahan, dan daftar prioritas masalah di bawah desa/kelurahan. Hasil kesepakatan peserta musrenbang kecamatan berupa daftar prioritas usulan/kegiatan kecamatan yang merupakan hasil kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta merupakan hasil interaksi antara stakeholders. Pada umumnya dapat diterima peserta musrenbang khususnya dan masyarakat kecamatan Keritang umumnya. Keempat, legalitas perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan merupakan tanggung jawab Camat Keritang dibantu oleh perangkat Kecamatan. Untuk menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2015 tentang tata cara penyusunan, penetapan, pelaporan Rencana Kerja Pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Kelima, hubungan tingkat sosial ekonomi masyarakat dengan tingkat partisipasi dalam pelaksana-

naanya program DMIJ di Kecamatan Keritang belum maksimal dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dari program ini. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk terlibat dan tidak mau tahu. Padahal tujuan program DMIJ ini merupakan kepentingan masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan perekonomian melalui kegiatan pembangunan fisik seperti semenisasi, jembatan dan tanggul-tanggul di perkebunan sedangkan non fisik seperti pelatihan-pelatihan, program PAUD, posyandu, PKK serta program magrib mengaji. Kegiatan ini semua bertujuan untuk meningkatkan SDM masyarakat yang berkualitas.

SIMPULAN

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir belum dilaksanakan secara optimal dan masih rendah, karena fokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan atau identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT/RW belum dilakukan secara menyeluruh di desa yaitu Desa Kotabaru Seberida, Desa Seberang Pebenaan, dan Desa Kayu Raja. Kemudian partisipatoris, dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh waktu dan tempat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi. Siner-

gitas Perencanaan yaitu proses perencanaan Pembangunan di Kecamatan Keritang selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders.

Hal ini dapat dilihat dari usulan desa dan SKPD bisa dikomunikasikan bersama-sama walaupun adakalanya tidak sinkron. Legalitas Perencanaan, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Unsur legalitas belum dilakukan dengan baik kerana ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis program desa maju Inhil Jaya yang belum dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan. Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan hubungan tingkat sosial ekonomi masyarakat dengan tingkat partisipasi masih rendah.

DAFTAR RUJUKAN

- Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Wijaya, Rina, 2001, *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*, Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gaaadjah Mada, Yogyakarta.